

# POTENSI DAN KENDALA PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN DI PESANTREN: KASUS DI KABUPATEN BANGKALAN

Titik Handayani

## **Abstract**

*This article will expose the potency and constraint faced by pesantren (Islamic boarding school) in policy implementation of Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun (Nine Years Basic Education Program) in regency of Bangkalan, East Java, considering that the education in Bangkalan, Madura generally either quantitatively or qualitatively is still pertained "low" if compared with education in East Java in general. Though, administratively Bangkalan, Madura Island included into east Java Province and geographically Bangkalan abuts with the second metropolitan town that is Surabaya. Even, East Java Province will specify the policy of twelve years basic education program until senior high school level (Depdiknas, 2008)*

**Keywords:** *implementation of Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun in pesantren*

## **Pendahuluan**

Program wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas), khususnya Wajar Dikdas Enam Tahun sudah dicanangkan sejak Undang-Undang No.4 tahun 1950 tentang Pokok Pengajaran di Sekolah yang menjadi Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1984. Dengan demikian sejak pemerintahan Presiden Soekarno sudah ada pencanaangan Wajar Dikdas Enam Tahun (tamat SD) dengan pembiayaan ditanggung oleh negara (Dharmaningtyas, 2004). Sedangkan program Wajar

---

Titik Handayani adalah  
Tim Peneliti Pendidikan pada Puslit  
Kependudukan Lembaga Ilmu  
Pengetahuan Indonesia

Dikdas Sembilan Tahun yang merupakan kelanjutan dari program Wajar Dikdas Enam tahun, secara resmi dicanangkan sejak keluar Peraturan Pemerintah (PP) No.28 Tahun 1990. PP tersebut juga diperkuat dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, akan tetapi PP tersebut masih didasarkan pada UU Sisdiknas yang lama yaitu UU No. 2 Tahun 1989. Sementara itu, PP yang baru berkaitan dengan Program Wajib Belajar yang didasarkan pada UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003, sampai saat ini masih berbentuk rancangan (RPP).

Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun, ditargetkan dapat tuntas pada akhir tahun 2008 ini, dengan indikator diantaranya pencapaian angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP/MTs sederajat sebesar 95 persen. Berdasarkan data Depdiknas pada akhir tahun 2007 menunjukkan bahwa APK SMP/MTs sederajat telah mencapai 92,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target 95 persen pada akhir tahun 2008 diharapkan dapat dilampaui dengan meningkatkan kekurangan sebanyak 2,48 persen. Optimisme akan tuntasnya program tersebut juga beberapa kali dikemukakan oleh Mendiknas dalam berbagai kesempatan diantaranya pada Rembuk Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Depdiknas awal februari 2008. (Depdiknas,2008). Padahal capaian tersebut merupakan rata-rata nasional, sementara itu, dari 450 kabupaten/ kota di Indonesia, masih terdapat 111 kabupaten/kota yang mempunyai pencapaian kurang dari 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antar daerah dalam hal pencapaian angka partisipasi. Di samping itu meskipun penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun hanya memerlukan penambahan angka 2,48 persen, akan tetapi kekurangan ini justru terjadi di daerah daerah "remote area" yang sulit mendapatkan akses layanan pendidikan formal serta pada anak anak dengan latar belakang sosial ekonomi orang tua kurang mampu. Sulitnya meningkatkan partisipasi siswa pada daerah-daerah yang terisolasi secara geografis, dan daerah-daerah dengan karakteristik sosial ekonomi penduduk relatif rendah, diantaranya sering dapat dijangkau oleh lembaga pendidikan seperti pesantren. Mengingat bahwa pesantren merupakan sistem pendidikan yang murah biayanya menjadi alternatif terbaik bagi kalangan muslim miskin di wilayah pedesaan (Effendy, 1995).

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren juga merupakan salah satu lembaga penyelenggara Wajar Dikdas. Berdasarkan hasil rembuk nasional pendidikan pada tahun 2007, untuk mencapai

target Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun, penuntasan ditanggung bersama antara Departemen Pendidikan Agama dan Departemen Pendidikan Nasional. Persentase pembagian penuntasan tanggung jawab penuntasan di Depdiknas sebesar 78,71 persen dan Departemen Agama sebesar 21,29 persen yang dilaksanakan melalui pendidikan di MI dan MTs sebesar 18,76 persen dan pendidikan pada pondok pesantren sebesar 2,53 persen atau terdapat sekitar 588.098 santri peserta Program Wajib Belajar 9 Tahun, 221.827 tingkat Ula (setara SD/MI) dan 366.261 tingkat Wustha (setara SMP/MTs). (Depdiknas dan Departemen Agama, 2007).

Tulisan ini akan mengemukakan potensi dan kendala yang dihadapi pesantren dalam implementasi kebijakan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur. Mengingat bahwa pendidikan di Bangkalan Madura baik secara kuantitatif maupun kualitatif pada umumnya masih tergolong “rendah” bila dibandingkan dengan pendidikan di Jawa Timur pada umumnya. Padahal, secara administratif Bangkalan, Pulau Madura termasuk ke dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dan secara geografis, Bangkalan berbatasan dengan kota metropolitan kedua yaitu Surabaya. Bahkan di Provinsi Jawa Timur sudah akan men-canangkan kebijakan Program wajar Dikdas Dua Belas Tahun sampai jenjang SMA (Depdiknas,2008).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan bagian dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2006. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diantaranya adalah data sekunder tentang pencapaian partisipasi pendidikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan wajib belajar. Data kualitatif diperoleh berdasarkan wawancara mendalam dengan ketua yayasan, pimpinan pondok pesantren, kiai, guru serta anggota DPRD yang membawahi bidang pendidikan serta informan lain yang relevan serta dilakukan pula *focus group discussion (FGD)* dengan beberapa kelompok nara sumber.

### **Pencapaian Wajar Dikdas Sembilan Tahun Di Kabupaten Bangkalan**

Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Pulau Madura, mempunyai latar belakang sosial kependidikan yang tentunya sama dengan masyarakat Madura pada umumnya. Pulau Madura dikenal sebagai pulau seribu santri, karena di sana terdapat ratusan pondok pesantren dengan

puluhan ribu santri. Di Madura pada umumnya termasuk Kabupaten Bangkalan dijumpai empat jenis institusi pendidikan yaitu pendidikan umum (TK – Perguruan tinggi), Pendidikan Madrasah (Raudatul Athfal sampai dengan Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi Agama Islam), Madrasah Diniyah (Taman Pendidikan Alquran, Madrasah Awaliyah, Madrasah Ula dan Wustho) serta Pondok Pesantren (Salafiyah dan Modern). Dua institusi pendidikan yang terakhir pada awalnya lebih banyak dikelola oleh institusi pondok pesantren, dan masyarakat. Keragaman institusi pendidikan ini secara otomatis memberikan keragaman mengenai peta permasalahan pendidikan. Mengingat keberadaan institusi ini telah hadir terlebih dulu, maka madrasah diniyah dan pondok pesantren lebih banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini pada gilirannya berpengaruh terhadap pencapaian angka partisipasi pendidikan sebagai salah satu indikator penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang nara sumber bahwa : Secara umum, masyarakat Madura lebih memilih pendidikan pesantren daripada pendidikan atau sekolah umum dan keberadaan institusi pendidikan madrasah diniyah dan juga pesantren menjadi alternatif utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan karena begitu besarnya pengaruh kyai pada madrasah-madrasah, maka keberadaan madrasah itu pun dapat mengalahkan keberadaan sekolah-sekolah umum.

Bila dilihat dari salah satu indikator pencapaian Wajar Dikdas 9 tahun yaitu angka partisipasi kasar (APK) tingkat SMP/MTs, pencapaian SMP/MTs pada tahun 2005 di Bangkalan hanya 51,9 persen sementara di Jawa Timur mencapai 84,8 persen. Hal ini berkaitan dengan banyaknya anak yang berstatus sebagai santri di pondok pesantren salafiyah, dan mereka cenderung tidak tercatat sebagai murid/anak sekolah, karena angka partisipasi pendidikan cenderung dihitung dari sekolah - sekolah "formal" yaitu sekolah umum dan madrasah". Hal itu tentu berakibat pada rendahnya cakupan atau angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Bangkalan. Apabila pendidikan pesantren dimasukkan dalam perhitungan, maka posisinya menjadi berbeda. Berdasarkan data pada tahun 2006, APM di tingkat SMP, termasuk MTs dan pesantren salafiyah adalah sebesar 67 persen dan APK sekitar 75 persen. Sementara itu, apabila siswa pesantren salafiyah tidak disertakan dalam perhitungan APM dan APK, maka besarnya angka partisipasi menjadi lebih kecil yaitu sekitar 62 persen untuk APM. Sedangkan untuk APK, angkanya turun cukup besar yaitu menjadi sekitar 55 persen atau turun sekitar

20 persen. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa siswa pesantren salafiyah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pencapaian APK di tingkat SMP dan yang sederajat di Kabupaten Bangkalan (Tabel 1). Apabila para santri di pesantren dimasukkan sebagai kategori “berstatus sekolah” pada perhitungan angka partisipasi pendidikan, maka program Wajar Dikdas sembilan tahun memang sangat strategis untuk daerah-daerah seperti Kabupaten Bangkalan.

Lebih lanjut apabila dicermati angka partisipasi di tingkat kecamatan menunjukkan kesenjangan yang cukup tajam. Angka terendah, terdapat di Kecamatan Kokop yang mempunyai APM dan APK tingkat SMP/ Madrasah Tsanawiyah dan Pesantren Salafiyah hanya sekitar 15 persen, dan yang tertinggi di Kecamatan Bangkalan sebagai pusat kabupaten mempunyai APM dan APK lebih dari 150. Hal ini menunjukkan perbedaan akses dalam pelayanan pendidikan yang tidak merata serta perbedaan minat dalam melanjutkan tingkat pendidikan ke jenjang setingkat SMP yang rendah di Kecamatan Kokop. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah di tingkat SMP atau yang sederajat di wilayah tersebut membuat orang tua harus mengeluarkan biaya transport yang cukup memberatkan bagi orang tua yang kebanyakan relatif miskin. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang nara sumber bahwa :

“rata-rata orang tua di wilayah Kecamatan Kokop menganggap bahwa sekolah sampai tingkat SD sudah cukup untuk bekal mencari kerja, karena kalau harus melanjutkan ke tingkat SMP berarti harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal dan belum tentu memperoleh pekerjaan yang lebih baik”.

Apabila memperhatikan perbedaan APM dan APK tingkat SMP sederajat dengan mempertimbangkan siswa pesantren salafiyah sebagaimana diperlihatkan data dalam Tabel 1, menunjukkan bahwa di Kecamatan Bangkalan yang berada di pusat kota dengan konsentrasi pondok pesantren berada di kecamatan ini, penurunan APK karena tidak mengikutsertakan siswa pesantren dalam perhitungan cukup besar yaitu mencapai sekitar 55 persen (dari sekitae 187 persen menjadi sekitar 135 persen). Hal ini menunjukkan banyaknya siswa pesantren di Kecamatan Bangkalan yang memberikan kontribusi signifikan bagi APK di wilayah tersebut. Keadaan ini juga terjadi wilayah kecamatan lain, meskipun tidak sebesar di Kecamatan Bangkalan.

Tabel 1.  
APM dan APK Tingkat SMP/MTS Kabupaten Bangkalan Per Kecamatan Th 2005/2006 menurut Perbedaan Keikutsertaan Siswa Pesantren Salafiyah.

No.	Kecamatan	Termasuk Pesantren		Tidak Termasuk Pesantren	
		APM	APK	APM	APK
1.	Bangkalan	165.99*	189.66	154.43*	134.72
2.	Socah	49.04	54.86	47.49	42.50
3.	Burneh	98.91	109.81	98.43	88.81
4.	Kamal	96.97	110.94	107.03*	93.57
5.	Arosbaya	100.66*	113.11	100.09	89.15
6.	Geger	31.18	34.49	31.23	28.28
7.	Klampus	44.43	50.00	40.49	36.02
8	Sepulu	57.04	64.55	48.54	42.84
9.	Tanjung Bumi	29.66	33.94	31.61	27.58
10	Kokop	14.91	16.79	13.37	11.87
11	Kwanyar	59.03	66.36	46.50	41.50
12	Labang	71.45	80.34	63.58	56.60
13	Tanah Merah	41.73	46.82	38.42	34.28
14	Tragah	52.71	60.17	53.91	47.21
15	Blega	86.92	98.02	65.47	58.11
16	Modung	99.54	110.82	97.46	87.69
17	Konang	43.83	49.20	30.16	26.99
18	Galis	41.29	46.13	40.32	36.17
19	JUMLAH	67.14	75.68	62.49	55.47

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan

Keterangan : \* : APM dihitung dari jumlah penduduk usia 13-15 th yang berstatus sekolah di tingkat SMP dan yg sederajat dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 th di wilayah yang bersangkutan dikalikan dengan 100. Jadi APM seharusnya mempunyai nilai maksimal 100. Kasus APM yang mempunyai angka lebih besar dari 100, disebabkan jumlah siswa berusia 13 – 15 th yang tercatat sebagai siswa SMP/MTs dan pesantren jumlahnya lebih besar dari penduduk usia 13-15 tahun. Jumlah siswa tersebut kemungkinan bukan penduduk dari wilayah kecamatan yang bersangkutan (pendatang) dari kecamatan lain, sehingga jumlah penduduk usia 13-15 tahun lebih kecil dari jumlah siswa pada usia tersebut.

### Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Pesantren: Potensi dan Kendala

Program Wajar Dikdas Sembilan tahun di pesantren mempunyai landasan hukum berdasarkan SKB Menteri Pendidikan dan Menteri Agama Nomor I/U/KB/2000 dan MA/86/2000 Tentang Penyelenggaraan Wajar Dikdas 9 tahun di Pesantren (Salafiyah). Di samping itu, di

pondok pesantren juga diselenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A (setara SD/MI); Paket B (setara SMP/MTs); dan Paket C (setara SMA/MA) yang penyelenggaraannya didasarkan pada Kesepakatan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas dan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor: 19/E/MS/2004 dan Nomor: Dj.II/166/04 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren. Hal itu juga diperkuat oleh Kesepakatan Bersama Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama Nomor 19/E/MS/2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan. Meskipun berbagai landasan hukum telah mendorong pelaksanaan program penuntasan Wajar Dikdas, dalam implementasinya masih mengalami berbagai kendala di samping potensi yang ada.

Lembaga pendidikan pesantren di Madura termasuk Kabupaten Bangkalan sebagai daerah yang dikenal dengan “seribu pesantren” merupakan wilayah cukup strategis apabila program Wajar Dikdas 9 tahun diimplementasikan, karena secara statistik mampu meningkatkan angka partisipasi cukup signifikan. Berdasarkan data dari Kanwil Depag Jatim, pada tahun 2006 di Jawa Timur terdapat sekitar 2.146 pesantren salafiyah penyelenggara program Wajar Dikdas dengan jumlah peserta didik 222.397 orang yang tersebar di 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Di Kabupaten Bangkalan, dari 262 pondok pesantren salafiyah yang tercatat di Departemen Agama Kabupaten, terdapat 248 pondok pesantren atau sekitar 95 persen yang mengikuti Program Wajar Dikdas, dengan jumlah santri untuk tingkat Awaliyah/Ula sebanyak 71.856 dan untuk tingkat Wustho sebanyak 22.582 (Departemen Agama Kabupaten Bangkalan, 2006). Hal ini tentunya merupakan potensi yang cukup besar.

Selain mempunyai potensi yang terkait dengan jumlah /kuantitas yang relatif besar, secara kualitatif potensi lain berkaitan dengan karakteristik dari pesantren yang ada. Paling tidak terdapat tiga nilai dan karakter pesantren yang memperkuat pesantren untuk implementasi Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun. *Pertama, hamlatul mas’uliyah*, rasa tanggung jawab dalam kehidupan bersama. Para santri selalu memiliki beban untuk senantiasa *tafaqquh fiddin*, mendalami ilmu agama yang hasilnya nanti akan ditunggu masyarakat. Sikap ini semakin kokoh tatkala mereka melihat figur Kyai yang selalu “membuka rumahnya” 24 jam guna menuntun umat ke arah yang diridldai Tuhan. *Kedua,*

*iftitah*, transparansi dan keterbukaan. Dalam suatu pesantren, hubungan antara Kyai dan Santri selalu terbuka. Santri dapat memantau perilaku, pekerjaan maupun kebiasaan Kyainya. Bahkan kekayaan yang dimiliki oleh Kyai pun dapat dengan mudah dipantau oleh santri. *Ketiga, at-ta'anun bil-birri wat-taqwa*, kebiasaan bergotong royong, saling bantu membantu dalam kebaikan. Dalam suatu pesantren senantiasa harus memiliki kepekaan sosial dengan teman, guru, Kyai maupun masyarakat. Kebersamaan dan saling tolong-menolong terbentuk mulai dengan membangun kamar atau asrama, menyiapkan kebutuhan dan konsumsi keseharian, hingga mencari solusi atas semua masalah yang dihadapi. (Aqil Siraj, 2002).

Karakteristik pesantren sebagaimana dikemukakan di atas sangat mendukung program Wajar Dikdas Sembilan Tahun dalam konteks, apabila terdapat santri yang mengalami kesulitan baik kesulitan finansial, kemampuan menyerap materi pelajaran dan terpaksa akan keluar dari pesantren pasti akan di atasi bersama sama, sehingga kemungkinan santri untuk *drop-out* menjadi kecil atau bahkan tidak ada. Sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang nara sumber bahwa:

“Sifat atau karakteristik yang lentur dalam lembaga pendidikan pesantren sangat memungkinkan terjadinya hubungan egaliter, toleransi, membangun kepekaan dan kebersamaan dan tolong menolong. Hal ini menjadikan pesantren sebagai salah satu alternatif bagi anak usia sekolah yang berasal dari pedesaan dan golongan ekonomi kurang mampu yang tidak dapat mengenyam pendidikan di sekolah umum”.

Peranan pesantren juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat, baik masyarakat sekitar, wali santri, alumni, maupun simpatisan lainnya. Masyarakat sekitar bisa menjadi indikator, makin erat relasi sosialnya atau guyubnya pesantren dengan masyarakat sekitar, maka pesantren itu bisa dikatakan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat mengikuti tuntutan dan dinamika lingkungannya. Artinya, kegiatan pengembangan yang dilakukan pesantren merupakan suatu keharusan agar pesantren dapat terus eksis dalam masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Implementasi Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di pesantren juga berimplikasi pada perubahan metode pembelajaran maupun penambahan mata pelajaran umum di pesantren, yaitu pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPA untuk program Ulla setingkat SD. Sementara untuk program Wustho atau setingkat SMP ditambah pelajaran



Matematika, Bahasa Indonesia, PPKN, IPA, dan Bahasa Inggris. Dalam kaitan proses pembelajaran ini, untuk beberapa pesantren di Bangkalan relatif tidak mengalami kendala.

Selama ini pesantren di Bangkalan mempunyai beberapa model pembelajaran yang dikembangkan. *Model Pertama*, adalah pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama Islam. Artinya, orang belajar di pondok pesantren dengan tujuan utamanya adalah belajar tentang agama Islam, termasuk juga belajar Kitab Kuning. Sebagai contoh, Pesantren Raudlatul Muta'alimin, Sebanih, yang merupakan pesantren salaf khusus putri yang terbesar di Bangkalan. Di Sebanih ini guru yang mengajar masih harus berasal dari lingkungan keluarga, belum boleh guru dari luar. Pesantren model pertama ini secara kuantitatif jumlahnya sekitar 20- 30 persen. *Model kedua*, adalah pondok pesantren yang pendidikan di dalamnya hanya diniyah (agama) saja, tetapi santri diperbolehkan atau bahkan dianjurkan sekolah di luar, seperti misalnya Pondok Pesantren Syaichona Kholil I dan II, Pesantren Al-Hidayah II, dan Jangkibuan. Pesantren model ini jumlahnya sekitar 35 persen. *Model ketiga* adalah pondok pesantren yang selain mengajarkan Kitab Salaf atau dikenal dengan Kitab Kuning, juga mengelola madrasah, sehingga santri yang mondok di sana selain dapat belajar Kitab Kuning juga dapat belajar pendidikan umum dan memperoleh ijazah, diantaranya seperti di Pesantren Mambaul Hikam, Ketengan, Burneh, Pesantren Darul Manan Arosbaya, Miftahul Ulum Modung, Pesantren Nurul Amanah Tragah, dan Pesantren Nurul Iman Labang. Jumlah pondok pesantren model ketiga ini juga sekitar 35 persen (Madura Mandiri, 2005). Model pembelajaran dari pesantren model kedua dan ketiga merupakan model pesantren yang telah mengadakan pembaharuan, sehingga relatif lebih mudah beradaptasi. Untuk pembelajaran dan penambahan mata pelajaran, hal ini tentunya merupakan potensi dalam mengimplementasikan Program Wajar Dikdas dan pesantren juga mudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Qomar (2005) bahwa pembaharuan dalam pesantren terkait dengan manajemen di dalamnya berpotensi membuka berbagai inovasi dan program. Dalam pesantren terdapat madrasah bahkan sekolah umum. Pendirian madrasah dan sekolah umum dalam satu bagian yayasan dengan pesantren disebabkan oleh dua faktor: *pertama*, karena dampak global dari pembangunan nasional serta kemajuan ilmu pengetahuan; dan *kedua*, karena kepentingan

menyelamatkan pesantren dari kematiannya. Jika pendirian Madrasah di dalam pesantren merupakan pembaharuan, maka pendirian sekolah-sekolah umum adalah pemantapan pembaharuan. Sementara itu menurut Kyai Said Aqiel Siraj (2000), Rais Syuriah PBNU, pesantren bisa dibagi menjadi tiga karakter yang secara umum menggambarkan profil pesantren di Madura dan masing-masing muncul akibat modernisasi yang berkembang saat ini. *Pertama*, model pesantren yang masih mempertahankan sistem Salafiyahnya, dan menolak sama sekali intervensi kurikulum dunia luar. *Kedua*, model pesantren yang sudah lebur dengan modernisasi. Ada pelajaran atau kurikulum salafiyah dan ada pula kurikulum umum (kurikulum Depag atau Diknas). *Ketiga*, model pesantren yang mengikuti proses perubahan modernitas, tanpa sama sekali menghilangkan kurikulum lama yang salafi. Ada pendidikan umum, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan kurikulum Depag. Karakter pesantren tersebut juga berpengaruh terhadap implementasi Wajar Dikdas Sembilan tahun yang harus menambahkan beberapa mata pelajaran tertentu. Di samping karena masuknya program ini sama sekali tidak mengganggu independensi kurikulum yang diterapkan serta sistem pengajaran salafy yang selama ini tetap diyakini, juga materi pelajaran yang dituntut untuk mengikuti program ini pada dasarnya telah lama diajarkan di Madrasah Salafiyah yang menjadi bagian dari beberapa pesantren. Dengan demikian, yang diperlukan hanyalah penyesuaian format, bahan dan modul sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berkaitan dengan pembelajaran, secara umum program pesantren terbagi menjadi dua jenjang, yaitu Program Ula atau setingkat Sekolah Dasar dan Program Wustho atau setingkat Sekolah Menengah Pertama. Program Ula diselenggarakan bersamaan dengan jenjang Ibtidadiyah untuk mendapatkan standar kelulusan setingkat Sekolah Dasar dengan perkecualian yang telah memiliki ijazah SD atau MI formal. Sedangkan Program Wustho diselenggarakan bersamaan dengan jenjang Ibtid'iyah untuk mendapatkan standar kelulusan setingkat Sekolah Menengah Pertama. Ijazah yang dikeluarkan dari kedua program tersebut adalah formal dan setara sehingga dapat digunakan sebagaimana layaknya ijazah formal. Para santri atau peserta didik juga memiliki kesempatan belajar ke jenjang lebih tinggi dan memiliki hak yang sama dengan mereka yang belajar di SD/MI dan SMP/MTs.

Adanya pembaharuan dalam kelembagaan dan model pembelajaran dalam pesantren sebagaimana dikemukakan di atas, juga akan mengurangi adanya dikotomi persepsi masyarakat terhadap pendidikan umum dan pendidikan agama di Kabupaten Bangkalan, terutama terjadi di pelosok-pelosok pedesaan. Selama ini, khususnya masyarakat yang tinggal di pelosok pedesaan dan jauh dari informasi, masih ada yang memandang bahwa sekolah umum tidak berguna, sehingga lebih baik anak-anak dimasukkan ke sekolah agama yang bisa belajar dua sekaligus, yaitu ilmu dunia dan ilmu agama. Dengan demikian, bagi masyarakat di desa lebih menghargai Diniyah yang berada di bawah pesantren daripada SD. Pilihan ke Diniyah itu juga tidak lepas dari anggapan bahwa sekolah di Diniyah itu sama halnya dengan mengaji, bagi yang tidak sempat mondok di pesantren. Dengan kata lain, dikotomi itu muncul sebagai akibat adanya persepsi yang cukup kuat tentang pendidikan agama. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan, dikotomi itu tidak begitu dirasakan, karena umumnya mereka menjalani pendidikan dua kali, yaitu pendidikan umum di sekolah-sekolah pada waktu pagi dan pendidikan agama di Madrasah diniyah pada siang hari. Menurut salah seorang nara sumber :

“Dikotomi itu sampai sekarang masih ada meskipun tingkatannya menurun. Dulu sering terjadi di SD dan SLTP kekurangan murid, sementara di Diniyah penuh murid. Untuk menghindari terjadinya kekosongan di Madrasah dan SD-SLTP itu maka jam sekolah pun harus diatur. Misalnya, jika Madrasah dan SD masuk pagi, maka Diniyah masuk sore. Atau sebaliknya bila Diniyah masuk pagi, maka Madrasah dan SD harus masuk sore. Itu pun ada kesepakatan, bila Madrasah dan SD masuk pagi, maka jam 12.00 sudah harus pulang. Sebab kalau tidak itu bisa mengganggu Diniyah. Kepala SD tidak berani melawan keputusan itu, sebab kalau sampai melawan sangat mungkin anak-anak itu oleh orang tuanya dilarang bersekolah di SD, dan dimasukkan ke Diniyah. Hal ini mengindikasikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Diniyah.”

Pada perkembangannya, seiring dengan pembaharuan manajemen, perubahan kelembagaan termasuk metode pembelajaran dan penambahan kurikulum di pesantren sebagaimana dikemukakan di atas, dikotomi persepsi terhadap pendidikan umum dan agama – pesantren akan semakin berkurang. Hal ini juga semakin memperkuat implementasi Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di pesantren

Potensi lain berkaitan dengan implementasi Wajar Dikdas Sembilan Tahun di pesantren adalah berkaitan dengan pendanaan. Pesantren yang menjalankan program Wajar Dikdas Sembilan tahun berimplikasi pada pesantren-pesantren yang bersangkutan juga berhak mendapatkan dana bantuan yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah dana yang diterima setiap pesantren tergantung dari jumlah santri, untuk tingkat Ula, setiap santri mendapat bantuan Rp.254.000 per tahun dan untuk santri tingkat Wustho sebesar Rp.354.000 per tahun. Dana bantuan tersebut dikelola oleh pesantren atau madrasah diniyah yang berada dibawah pesantren sebagai lembaga penyelenggara Wajar Dikdas. Menurut informasi dari pengasuh dan pengurus pesantren, bantuan tersebut sangat membantu penyelenggaraan atau biaya operasional pesantren yang selama ini relatif kecil karena hanya bersumber dari masyarakat.

Disamping itu juga terdapat bantuan lain, seperti dikemukakan oleh nara sumber dari Departemen Agama bahwa:

“PK Pontren Depag memberikan bantuan pada pendidikan pontren salafiyah dan madrasah diniyah. Mulai dari pemberian BOS reguler PPS Ula (setingkat MI/SD) dan Wustho (setingkat MTs/SPM), BOS Buku PPS Ula dan Wustho, Bantuan Ruang Kelas Baru (RKB), insentif guru PPS Ula dan Wustho, hingga bantuan lab bahasa pontren dan bantuan kitab kuning”

Adanya pemberian bantuan tersebut tentu sangat memberikan kontribusi finansial yang cukup berarti bagi proses pembelajaran dan pendidikan di pesantren yang pendanaannya cenderung bersumber dari masyarakat. Selama ini pesantren di Bangkalan, apabila dilihat dari segi pembiayaannya terdapat tiga kategori pesantren. *Pertama*, ada pesantren yang seluruhnya dibiayai oleh masyarakat, artinya tidak mau menerima bantuan dari pemerintah. *Kedua*, pesantren yang sumber dananya dari masyarakat, tetapi tidak menolak jika dibantu oleh pemerintah. *Ketiga*, pesantren yang sumber dananya dari masyarakat, tetapi juga meminta dari pemerintah.

Di samping berbagai potensi yang dimiliki pesantren sebagaimana dikemukakan, di sisi lain tetap ditemui beberapa kendala. Diantaranya adalah relatif sulitnya program Wajar Dikdas Sembilan Tahun dalam pesantren akibat kurangnya sosialisasi. Sejak SKB Mendiknas dan Menteri Agama tersebut, pondok pesantren salafiyah yang mengikuti program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di Bangkalan baru dimulai

pada akhir tahun 2002, bahkan lebih dari 100 pondok pesantren baru mengikuti program tersebut pada akhir tahun 2005. Hal ini juga berkaitan dengan beberapa karakteristik pesantren sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Bagi pesantren yang mempunyai karakteristik masih mempertahankan sistem Salafiyahnya, dan menolak sama sekali intervensi kurikulum luar tentu cenderung sulit menerima program Wajar Dikdas.

Dikemukakan oleh Biyanto (2006), agar program wajar Dikdas di pesantren salafiyah dapat terlaksana dengan baik, maka pesantren perlu mengembangkan diri mengingat bahwa kebanyakan pesantren mengalami problem di bidang manajemen dan kepemimpinan, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana; pembiayaan dan daya dukung *local stakeholder* yang sangat rendah. Jika persoalan kultur pesantren diperbaiki maka persoalan yang selama ini menghambat pengembangan program Wajar Dikdas akan dapat diminimalkan.

Saat diadakan kajian, pondok pesantren juga telah mengalami perubahan yang pesat dengan adanya kecenderungan di sebagian pesantren telah mengembangkan kelembagaannya dengan membuka sistim madrasah dan sekolah umum, bahkan sekolah kejuruan seperti bidang pertanian, peternakan, teknik dan akhir-akhir ini membuka program Diploma untuk keguruan, karena adanya kekurangan guru di Kabupaten Bangkalan untuk pendidikan lanjutan.

Kendala lain yang masih dihadapi oleh pesantren dalam mengimplementasikan program Wajar Dikdas Sembilan Tahun adalah persoalan kurangnya guru yang layak mengajar, khususnya untuk mata pelajaran umum. Sebagaimana dikemukakan oleh nara sumber, ketua yayasan salah satu pesantren bahwa :

“kekurangan guru yang dialami lebih menyangkut soal kualitas, yaitu guru-guru yang memenuhi kualifikasi untuk mengajar sesuai dengan jenjang masing-masing. Secara kuantitatif relatif tidak ada masalah, tetapi jumlah yang besar itu tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajar. Hal itu disebabkan oleh dua hal, pertama kekurangan guru yang berkualitas dan kedua apabila terdapat guru yang berkualitas maka tentu tidak mampu membayar secara layak dan sesuai dengan kualifikasinya. Kemampuan madrasah diniyah dan pondok pesantren atau yayasan penyelenggara untuk menggaji guru amat rendah, ada yang sekedar memberi uang transport sekedarnya. Tetapi karena uang transport tersebut tidak cukup untuk transport maka sering disebut sebagai “uang sabun”, karena memang hanya cukup untuk membeli sabun saja”.

Para guru madrasah diniyah yang merupakan bagian dari pesantren, umumnya mengajar dengan motivasi utama untuk mengabdikan atau memperoleh barokah dari Allah dan Kyai. Banyak di antara mereka adalah alumni dari pondok yang bersangkutan, sehingga mereka ingin membalas budi dengan menjadi guru.

Berkaitan dengan kendala di atas, persoalan lain adalah dukungan dari pemerintah daerah yang relatif kurang. Pesantren yang telah mengembangkan sistem madrasah (standar Depag) dan sekolah (standart Diknas) ke dalam kampusnya, ternyata mendapat dukungan financial yang kurang menggembirakan. Di Bangkalan terdapat dua pesantren seperti itu. Masyarakat Bangkalan pada umumnya masih melihat bahwa sumbangan kepada lembaga pendidikan 'umum' dan kejuruan, termasuk yang berada di lingkungan pesantren sekalipun, tidaklah begitu tinggi nilainya dan hanya bermakna profan dibandingkan bila sumbangan itu diberikan sebagai wakaf yang bermakna sakral untuk pembangunan masjid, pesantren Salafi atau Madrasah Diniyah. Oleh karena itu upaya untuk mengubah pesantren yang semula semata-mata mengajarkan ilmu agama ke bentuk pesantren yang juga menyelenggarakan pendidikan umum/kejuruan kurang begitu berkembang. Di pihak lain, pemerintah nampak bersifat menganak-tirikan madrasah diniyah termasuk pesantren dalam kebijakannya (Sukarno, 2007).

Mengingat fungsi pesantren yang sangat strategis dan perannya yang besar dalam masyarakat, maka penyelenggaraan program Wajar Dikdas berbasis pesantren memerlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari segenap stakeholder. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak hanya mendapatkan pelajaran umum tetapi sekaligus mendapatkan pendidikan agama (pesantren). Sehingga diharapkan tercipta generasi yang cerdas, mandiri dan bertaqwa. Dengan demikian penyelenggaraan program tersebut merupakan solusi yang paling tepat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memperoleh kesempatan untuk bersekolah, sekaligus ikut berperan aktif dalam mensukseskan Program Wajar Dikdas 9 tahun.

## **Penutup**

Pesantren sebagai lembaga yang mengiringi dakwah Islamiyah di Indonesia memiliki persepsi yang plural. Pesantren bisa dipandang sebagai lembaga ritual, lembaga pembinaan moral, lembaga dakwah dan sebagai institusi pendidikan Islam yang menghadapi tantangan

internal dan eksternal. Pesantren yang tumbuh dari bawah atas kehendak masyarakat juga mempunyai perkembangan yang cukup dinamis.

Di saat pesantren sedang mengalami transformasi institusi, transformasi sistem pendidikan, transformasi kurikulum dan metode pendidikan, Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun di pesantren digulirkan oleh pemerintah, sehingga politik pendidikan pesantren telah mengalami pergeseran terkait dengan kekuasaan negara, dan kebijakan pemerintah.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren yang telah eksis di tengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15 hingga sekarang) dan sejak awal berdirinya telah menawarkan pendidikan kepada mereka yang masih buta huruf. Bahkan pesantren pernah menjadi satu-satunya institusi pendidikan milik masyarakat pribumi yang memberikan kontribusi sangat besar dalam membentuk masyarakat melek huruf (*literacy*) dan melek budaya (*cultural literacy*) (Qomar, 2005). Dengan demikian, pada masa sekarang tidak perlu diragukan lagi kemampuan pesantren untuk mengimplementasikan Program Wajar Dikdas Sembilan Tahun.

Persoalannya, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang secara struktural berada di bawah Departemen Agama dan merupakan institusi yang tidak “didesentralisasikan,” berbeda halnya dengan sekolah umum dibawah Dinas Pendidikan daerah yang didesentralisasikan. Keadaan ini menyisakan persoalan bagi penyelenggaraan pendidikan di pesantren, karena selama ini koordinasi antara Departemen Agama dan Departemen Pendidikan Nasional masih cenderung di atas kertas.

Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama harus lebih meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan intensif dalam pelaksanaan dan pengelolaan pesantren. Upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional, termasuk upaya penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun melalui pesantren harus sejalan dengan upaya merevitalisasi dan memodernisasi pesantren. Paling tidak, hal ini dapat dilakukan melalui beberapa terobosan. *Pertama*, menghapus dikotomi dan diskriminasi terhadap pendidikan pesantren yang selama ini dipandang sebagai bukan bagian dari sistem pendidikan nasional. *Kedua*, diperlukan adanya pola pendidikan dengan terobosan kurikulum terpadu yang memadukan antara pendekatan sains, agama, dan nilai kebangsaan. Dengan begitu, upaya penanaman nilai agama, moral, dan nilai kebangsaan pada anak didik dapat mencapai sasaran pembelajaran. *Ketiga* dan yang tak kalah penting lagi adalah upaya peningkatan kualifikasi, profesionalitas dan kesejahteraan guru pesantren sebagaimana amanat UU No 14/2005

tentang Guru dan Dosen. Sehingga, guru-guru di pesantren dapat mengajar dengan nyaman dan merasakan hidup yang sejahtera.

Sudah saatnya kita lebih memperhatikan dunia pendidikan pesantren. Pesantren harus ditempatkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pesantren telah memberikan kontribusi nyata dalam melahirkan generasi berkualitas dan mampu menjaga moralitas bangsa.

### SUMBER BACAAN

- Aqiel Siraj, Said, 2002, "Visi Pesantren Masa Depan dalam Menata Masyarakat Indonesia", makalah pada Seminar Nasional "Implementasi Akhlak Qurani", Panitia MAN-V PT Telekomunikasi Indonesia Tbk., Bandung, 23 April 2002 (<http://www.pesantrenonline.com>)
- Darmaningtyas, 2004, Pendidikan yang Memiskinkan, Yogyakarta, Galang Press.
- Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, 2005, Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah, Jakarta, Depdiknas dan Depag.
- Effendi, Bachtiar, "Nilai Nilai Kaum Santri", dalam M.Dawam Rahardjo (ed), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun Dari Bawah, 1985, Jakarta
- Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka, Th 1990, 1991, Madura Mandiri, 2004, Penelitian Pengembangan SDM Di Pulau Madura., Bangkalan, Lembaga Swadaya Masyarakat Madura Mandiri.
- Suyoto, 1995, "Pondok Pesantren dalam Alam Pendidikan Nasional" dalam *Pesantren dan Pembaruan*, Dawam Rahardjo (editor), Jakarta, LP3ES
- Sukarno Makmuri, 2007, dalam Handayani dkk., 2007, Partisipasi Pendidikan Dalam Perspektif Sosial Demografi, Ekonomi dan Budaya di Kabupaten Solok, Bangkalan dan Lombok Barat, Laporan Penelitian, Puslit Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Madura Mandiri, 2005, Pengkajian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pulau Madura, laporan penelitian.
- Qomar, Mujamil, 2005, Pesantren, Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi, Jakarta, Erlangga.
- Tilaar, H.A.R, 2003, Paradigma Baru Pendidikan Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta
- Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta : Sinar Grafika